

**ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI
SYARAT AKSES BERBAGAI LAYANAN PUBLIK PADA PORTAL BERITA
ONLINE CNNINDONESIA.COM BULAN FEBRUARI 2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Penyiaran



Diajukan Oleh:
Ridho Satria M.
07031281722100

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI
SYARAT AKSES BERBAGAI LAYANAN PUBLIK PADA PORTAL
MEDIA ONLINE CNNINDONESIA.COM BULAN FEBRUARI 2022”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi

Oleh :

Ridho Satria M.

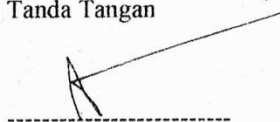
07031281722100

Pembimbing I

1 Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

Nip. 197905012002121005

Tanda Tangan



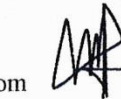
Tanggal

17-03-2022

Pembimbing II

2 Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom

NIP. 198802112019032011



25-03-2022



Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
Nip. 197905012002121005

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“ANALISIS FRAMING Pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Akses Berbagai Layanan Publik pada Portal Media Online CNNIndonesia.com Bulan Februari 2022”

Skripsi
Oleh :
Ridho Satria M.
07031281722100

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 April 2022

Pembimbing :

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
Nip. 197905012002121005
2. Rindang Senja Andarini, M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Tanda Tangan




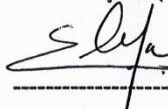


Penguji :

1. Annisa Rahmawati, M.I.Kom
NIP. 199209292020122014
2. Erlisa Saraswati, S.KPM., M.Sc
NIP. 199209132019032015

Tanda Tangan





Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004


Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Satria M.
NIM : 07031281722100
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 02 Maret 1999
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Analisis *Framing* Pemberitaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Akses Berbagai Layanan Publik Pada Portal Berita Online CNNIndonesia.com Bulan Februari 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 21 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Ridho Satria M.

NIM. 07031281722100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Hidup Seperti Larry”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT & Nabi Muhammad SAW
- Kedua orang tua ku tercinta (M. Haris Akbar dan Eni Sastra)
- Dosen Pembimbing Skripsiku (Bapak Andries Lionardo dan Mba Rindang Senja Andarini)
- Para Dosen FISIP Unsri Program Studi Ilmu Komunikasi
- Teman-teman Seperjuangan Program Studi Ilmu Komunikasi 2017.
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT AKSES BERBAGAI LAYANAN PUBLIK PADA PORTAL BERITA ONLINE CNNINDONESIA.COM BULAN FEBRUARI 2022”** yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penelitian skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi yang pada akhirnya dapat dilalui berkat banyaknya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak M. Haris Akbar dan Mamak Eni Sastra serta keempat saudara kandung tersayang Evita Dewi Harnis, Risa Rahmadani, M. Riza Rohmatdinata, dan Rismaya Khoirunnisa yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
5. Bapak Faisal Nomaini, S.Sos. M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.kom selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pemikiran untuk memberikan petunjuk, saran dan

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

7. Bapak Krisna Murti, S.I.Kom., MA selaku pembimbing akademik yang sudah banyak memberikan arahan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi.
8. Mba Vira, selaku admin jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya yang setiap saat selalu bersedia mengingatkan dan membantu penulis khususnya dalam hal administrasi skripsi.
9. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang sudah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi.
10. Yang terkasih Diah Ayu Habibaturrohmah yang selalu menemani, mendukung penuh, memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga kapanpun.
11. Para sahabat terbaik yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini Rafik, Fitra, Ajeng, Anis, Deka, Fury, Babana, Al, Iva, Derry, Icha, Desi, Indah, Alka, Yuyu, Anggun, Firman, Faisal, Handi.
12. Ikom Cinematography Unsri, dan seluruh Sesebuah ICU yang selalu menjadi tempat penulis berkembang dan menghilangkan penat.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNSRI yang sama-sama menyusun skripsi yang telah banyak membantu, dan teman-teman di luar kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, semoga diberikan balasan pahala oleh Allah SWT.

Indralaya, Maret 2022

Ridho Satria M.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pembingkaiian atau <i>Framing</i>	11
2.1.2 Media Massa	14
2.1.3 Portal berita <i>online</i>	16
2.1.4 BPJS Kesehatan	16
2.2 Teori yang Digunakan	19
2.3 Kerangka Pemikiran	20
2.4 Penelitian Terdahulu	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Definisi Konsep	28
3.2.1 Media Massa.....	28
3.2.2 Portal berita online	28
3.2.3 BPJS Kesehatan.....	28
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data	30
3.4.1 Sumber Data Primer	30
3.5 Unit Analisis	30
3.6 Teknik Analisis Data	30
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7.1 Teknik Dokumentasi	32
3.7.2 Teknik Literatur.....	32
3.7.3 Teknik Observasi.....	32
3.8 Teknik Keabsahan Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
4.1 Profil CNNIndonesia.com	35
4.1.1 Visi dan Misi CNNIndonesia.com	37
4.1.2 Struktur Organisasi CNNIndonesia.com.....	38
4.3 Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022.....	41
BAB V ANALISIS HASIL.....	43
5.1 Analisis <i>Framing</i> Pemberitaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Akses Berbagai Pelayanan Publik di CNNIndonesia.com	44
5.1.1 Berita “BPN: BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah”	44
5.1.2 Berita “DPR Minta Batalkan Aturan Jual Beli Tanah Wajib Punya Kartu BPJS”.....	47

5.1.3	Berita “Warga Keberatan BPJS Jadi Syarat Umroh: Semakin Ribet Birokrasi”	50
5.1.4	Berita “Warga Soal Kartu BPJS Kesehatan buat Jual Beli Tanah: Tak Ada Korelasi”	53
5.1.5	Berita “Alasan Kartu BPJS Kesehatan jadi Syarat Jual Beli Tanah Hingga SIM”	56
5.1.6	Berita “DPR: Instruksi Jokowi Kartu BPJS Jadi Syarat Beli Tanah Absurd”	58
5.1.7	Berita “PKS Kritik BPJS Jadi Syarat Jual-Beli Tanah: Pemerintah Putus Asa”	61
5.1.8	Berita “Warga Respons BPJS Kesehatan Jadi Syarat SIM: Malah Menghambat”	63
5.1.9	Berita “Moeldoko: Masyarakat Mampu Beli Tanah, Tak Masalah Bayar Iuran BPJS”	65
5.1.10	Berita “Syarat BPJS Kesehatan Dinilai Bikin Warga Malas Urus SIM dan STNK”	67
5.1.11	Berita “Muhadjir Soal BPJS Syarat Urus Dokumen: Bukan untuk Beratkan Rakyat”	70
5.1.12	Berita “Dampak Syarat Baru BPJS untuk Perpanjangan STNK Jika Tak Selaras”	72
5.2	Hasil Analisis <i>Framing</i> Berita	75
BAB VI PENUTUP		77
6.1	Kesimpulan	77
6.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 List Berita Terkait Pemberitaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Akses Berbagai Pelayanan Publik.....	8
Tabel 2.1 Skema Analisis Framing Robert N. Entman	12
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	29
Table 4.1 Visi dan Misi CNNIndonesia	37
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Detik.com	38
Tabel 5.1 List Berita Terkait Pemberitaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Akses Berbagai Pelayanan Publik Yang Akan di Analisis Pada Portal Media Online CNNIndonesia.com	43
Tabel 5.2 Analisis Framing 1	45
Tabel 5.3 Analisis Framing 2	47
Tabel 5.4 Analisis Framing 3	50
Tabel 5.5 Analisis Framing 4	53
Tabel 5.6 Analisis Framing 5	56
Tabel 5.7 Analisis Framing 6	58
Tabel 5.8 Analisis Framing 7	61
Tabel 5.9 Analisis Framing 8	63
Tabel 5.10 Analisis Framing 9	65
Tabel 5.11 Analisis Framing 10	67
Tabel 5.12 Analisis Framing 11	70
Tabel 5.13 Analisis Framing 12	72
Tabel 5.14 Hasil Analisis Framing Berita CNNIndonesia.com	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi BPJS Kesehatan	2
Gambar 1.2 Pemberitaan BPJS Kesehatan di Portal Media Online CNNIndonesia.com	7
Gambar 4.1 Logo CNN Indonesia.....	35
Gambar 4.2 Tampilan website CNNIndonesia.com.....	37
Gambar 4.3 Launching Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.....	41

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	21
------------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana portal berita online CNNIndonesia.com melakukan pembingkaihan terhadap berita BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik pada bulan Februari 2022 melalui analisis *framing* oleh Robert N. Entman. Teori ini terdiri dari empat elemen yaitu Pendefinisian masalah (*define problem*), Penyebab masalah (*diagnose causes*), klaim moral yang diberikan (*make moral judgement*) dan tawaran rekomendasi (*treatment recommendation*). Objek penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berita terkait BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat untuk mengakses berbagai layanan publik yang terbit selama bulan Februari tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkaihan dalam pemberitaan oleh portal berita online CNNIndonesia.com mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengurus pelayanan publik seperti, SIM, STNK, SKCK, jual beli tanah, umroh hingga naik haji digambarkan sebagai suatu kebijakan yang kurang tepat.

Kata kunci : Pembingkaihan, BPJS Kesehatan, Syarat Pelayanan Publik

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.SI
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Rindang Senja Andarini, M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Indralaya, Mei 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Hasni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

ABSTRACT

This study aims to discuss how the online news portal CNNIndonesia.com framed BPJS Health news as a condition of access to various public services in February 2022 through framing analysis by Robert N. Entman. This theory consists of four elements, namely defining the problem, the cause of the problem (diagnose causes), the moral claim given (make moral judgment) and the offer of recommendation (treatment recommendation). The object of this research is to collect news related to BPJS Health which is used as a condition to access various public services published during February 2022. The results show that the framing in the news by the online news portal CNNIndonesia.com regarding BPJS Health participation as a condition for managing public services such as , SIM, STNK, SKCK, buying and selling land, umrah to pilgrimage are described as inappropriate policies.

Keyword : Framing, BPJS Health, Public Service Requirement.

Advisor I

Advisor II



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.SI
NIP. 197905012002121005

Rindang Senja Andarini, M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Indralaya, May 2022

Head of Department Communication science

Faculty of social political science

Sriwijaya university



Dr. MS Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa adalah sarana atau kekuatan krusial pada suatu pembangunan dan pembentukan suatu opini publik. Sesuai dengan cirinya, Heryanto mengungkapkan, media massa adalah bentuk media yang diperuntukkan kepada masyarakat yang beragam, anonim, serta tersebar dengan demikian informasi dapat sampai dengan cepat serta serentak. (Heryanto, 2018) Kekuatan media massa inilah yang sangat ampuh memberikan dampak kepada masyarakat melalui opini publik yang dibentuk oleh pihak pemerintah atau elit politik.

Dewasa ini sangat mudah menemukan media massa yang tidak sejalan dengan koridornya sebagai media yang independen. Banyak media massa sekarang ini yang dicampuri oleh urusan politik dan sering dimanfaatkan untuk membangun opini publik agar dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka melakukan upaya agar dapat memiliki akses untuk masuk dan mempengaruhi suatu media, dengan tujuan penguasaan atas media tersebut dapat menjadi gerbang dalam pembentukan dan penguasaan opini publik (Heryanto, 2018)

Di awal tahun 2022 ini terdapat berita yang ramai dibincangkan publik yaitu berita mengenai BPJS Kesehatan sebagai persyaratan untuk mengurus berbagai pelayanan publik. Hal tersebut ramai diperbincangkan karena dianggap terlalu dipaksakan dan terlalu memberatkan rakyat. BPJS Kesehatan dijadikan syarat untuk mengurus berbagai pelayanan publik seperti, mengurus kartu surat izin mengemudi atau SIM, STNK, syarat naik haji hingga sebagai syarat jual beli tanah. Penerapan kebijakan ini direncanakan akan mulai berlaku pada 1 Maret 2022, sesuai dengan kebijakan yang berada di bawah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022.



Gambar 1.1 Ilustrasi BPJS Kesehatan

Sumber : CNNIndonesia.com 2022

Program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu program yang dibuat Pemerintah dengan tujuan menjamin kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan demikian diharapkan seluruh rakyat menjadi sejahtera, produktif dan menjalani hidup dengan tubuh yang sehat. Program jaminan kesehatan tersebut berupa manfaat pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh masing-masing individu secara lengkap, pelayanan tersebut meliputi berbagai jenis pengobatan, pemulihan, upaya mencegah penyakit, peningkatan kualitas kesehatan, dengan mengedepankan kualitas pelayanan yang tersistematis.

Program JKN dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip dalam bentuk ekuitas dan asuransi sosial. dalam artian menjaga kesetaraan mendapatkan layanan kesehatan berdasarkan keperluan medis yang dibutuhkan tidak berkaitan dengan jumlah biaya yang diurukan. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembiayaan yang diurukan berdasarkan persentase masing-masing yang telah ditentukan dari penghasilan pekerjaan dan kemudian bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau kurang mampu dapat ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia, terdapat beberapa manfaat dari program JKN bagi para pengguna layanan, yaitu (APBN, 2013)

- (1) Segala bentuk jenis layanan kesehatan diberikan melalui fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah ataupun pihak swasta yang bekerjasama dengan pihak JKN.
- (2) Adapun layanan dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan badan penyelenggara jaminan jika terdapat keadaan yang darurat.
- (3) Jika para peserta berada di wilayah yang belum memiliki fasilitas yang sesuai dengan persyaratan maka berhak mendapatkan kompensasi oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
- (4) Kelas standar diberikan untuk pelayanan rawat inap di rumah sakit.
- (5) Obat-obatan hingga bahan medis dijamin oleh Badan penyelenggara dengan mempertimbangkan efisiensi obat atau bahan medis, efektifitas, ketersediaan dan kebutuhan medik berdasarkan peraturan undang-undang.
- (6) Badan penyelenggara mengembangkan layanan dengan menerapkan sistem pembayaran, sistem kendali biaya dan sistem kendali mutu guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan dan menghindari penyelewengan layanan kesehatan.
- (7) Terdapat tambahan biaya peserta terhadap layanan yang dianggap dapat menyebabkan penyalahgunaan.

Pada awal Februari Pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 mengenai Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan menjamin semua rakyat Indonesia terlindungi dalam keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat dengan peningkatan keikutsertaan dan kepatuhan para peserta. Serta menambah kualitas dari pelayanan dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan.

Instruksi Presiden ini diberikan kepada 30 Kementerian atau Lembaga agar dapat menentukan tindakan yang dapat diambil sesuai kewenangan dalam mengoptimalkan penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun hal tersebut juga dianggap sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong semua rakyat dalam keikutsertaan program JKN yaitu BPJS Kesehatan. Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Maret 2022 ini menjadikan bukti keikutsertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan SIM, STNK, dan SKCK. Selain itu BPJS juga ditetapkan sebagai syarat beberapa sektor pelayanan publik seperti jual beli tanah, syarat naik haji dan umrah, syarat penerimaan kredit usaha rakyat (KUR), permohonan perizinan berusaha dan pelayanan publik, hingga berlaku bagi pelaku UMKM dan sektor perikanan. (Nugraha, 2022) Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hal Instruksi Presiden tersebut, masyarakat diwajibkan dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan. Dan menjadi bagian dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan dengan sistem asuransi kesehatan sosial.

Pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara daring, Kamis, 3 Februari 2022 Pemerintah menargetkan adanya peningkatan dari jumlah peserta BPJS. Adapun jumlah keanggotaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional sampai akhir tahun 2021 sebanyak 235,7 juta orang yang terdaftar, dengan indeks kepuasan diatas 80 persen. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut ditargetkan dapat menggapai 98 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang termasuk dalam RPJMN (2020-2024). (Febrianto, 2022)

Namun kebijakan BPJS Kesehatan yang dijadikan sebagai syarat berbagai urusan pelayanan publik ini berpotensi menimbulkan kebingungan serta menyulitkan rakyat. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan berbagai aktivitas registrasi dan identifikasi urusan pelayanan publik pembuatan SKCK, STNK hingga pengurusan SIM. Kebijakan tersebut terlihat terdapat unsur memaksakan dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya dalam pengimplementasiannya untuk mengurus pembuatan STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan pihak yang terkait dalam hal ini Polri semestinya saling melakukan penyelarasan dengan pihak yang terkait dalam penerapannya. Jika dalam

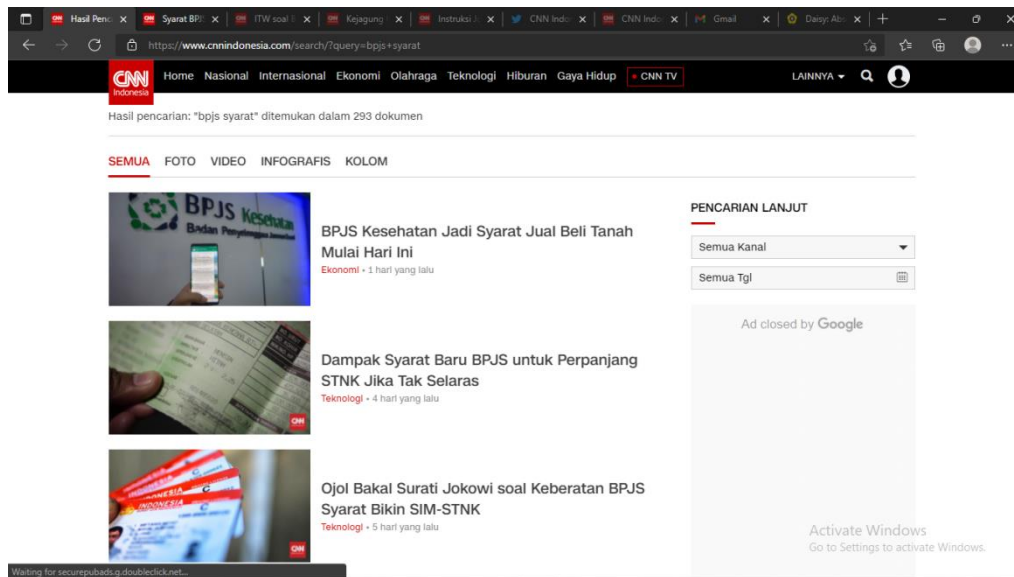
pembuatan STNK peserta belum menjadi anggota aktif BPJS Kesehatan maka akan berpengaruh dan menghambat dalam proses iuran pajak. Sehingga dapat memunculkan beberapa permasalahan dan persoalan baru. Selain itu Polri juga terlebih dahulu harus mengubah peraturan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan memasukan syarat pelayanan dengan mengharuskan melampirkan BPJS Kesehatan.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, sebagian masyarakat menganggap keputusan yang diambil pemerintah dalam menetapkan persyaratan dalam jual beli tanah harus memiliki kartu BPJS Kesehatan adalah solusi yang kurang tepat dan tidak ada korelasinya. Masyarakat juga menganggap peraturan yang seharusnya dibuat untuk menyederhanakan birokrasi malah dianggap semakin menyusahkan. Tujuan pemerintah agar seluruh masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan terkesan terlalu dipaksakan, karena tidak terdapat korelasi antara jual beli tanah dengan syarat kepesertaan BPJS.

Bahkan pada hari senin 21 Februari 2022 lalu BPJS Kesehatan sempat menjadi *trending topic* di media sosial Twitter dan menjadi topik yang sering dibicarakan warganet setelah diturunkannya kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Instruksi Presiden tersebut menimbulkan kebingungan dan tanda tanya bagi para pengguna Twitter. Beberapa warganet bahkan mempertanyakan apakah kartu BPJS Kesehatan tersebut dapat dipakai ketika jatuh sakit pada saat sedang naik haji atau umrah seperti yang diungkapkan oleh akun twitter @na_dirs. Selain itu salah satu akun Twitter @raenovaldy_ juga berkomentar bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya monopoli pemerintah dalam ranah asuransi “Warga negara idealnya memang punya asuransi kesehatan tapi ga musti dipaksakan pake BPJS juga, masih banyak produk asuransi lain... kalau udh diwajibkan untuk berbagai aspek ini bisa dikategorikan Monopoli dalam ranah bisnis asuransi ... lucu memang negeri ini...” kata @raenovaldy_.

Beberapa polemik yang bermunculan terhadap kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 mengenai BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat untuk mengurus berbagai pelayanan publik tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga datang dari Wakil Rakyat yang berada di Senayan yakni DPR dan sejumlah politisi yang mengkritisi kebijakan tersebut. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim yang menganggap kebijakan baru tersebut dapat merugikan masyarakat dan mempertanyakan keterkaitan antara BPJS Kesehatan dengan jual beli tanah. Sehingga Luqman Hakim meminta agar kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat transaksi jual beli tanah tersebut dapat dibatalkan.

Selain masyarakat dan beberapa politisi yang banyak memperbincangkan BPJS Kesehatan, media massa juga turut ramai memberitakan kebijakan Instruksi Presiden tersebut. Melalui pemberitaan yang sering diangkat oleh media massa membuat masyarakat menerima berbagai macam bentuk informasi yang disampaikan oleh media yang dimuat baik di media cetak ataupun media massa. Jika diperhatikan media mempunyai ciri khas tersendiri Karena masing-masing media memiliki cara berbeda dalam menanggapi suatu fenomena atau peristiwa. Masing-masing media membingkai suatu fenomena sesuai kepentingan atau keinginan pembuat berita tersebut untuk mempengaruhi khalayak. Hal tersebut erat kaitannya dengan *framing*, *framing* sendiri adalah penonjolan berita terhadap suatu peristiwa yang dibentuk oleh suatu media. Pada dasarnya *framing* merupakan tindakan yang dilakukan media untuk menonjolkan aspek tertentu yang dipilih dari realitas. *Framing* tentang bagaimana cara media membingkai suatu peristiwa sehingga mendapat perhatian khalayak dan dipercaya. Menurut Baterson dalam Sobur dalam Mawardi, *framing* merupakan perangkat yang mengorganisir suatu pandangan politik.



**Gambar 1.2 Pemberitaan BPJS Kesehatan di Portal Media Online
CNNIndonesia.com**

Sumber : CNNIndonesia.com 2022

Terdapat beberapa portal media online yang sering mengangkat pemberitaan mengenai kebijakan ini salah satunya CNNIndonesia.com. Berdiri sejak 20 Oktober 2014 sebagai situs web berita. CNNIndonesia.com berdiri atas kesepakatan oleh pihak PT Trans Media Corpora dan Hong Kong Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc, sehingga saat ini CNNIndonesia.com dinaungi oleh perusahaan media Transcorp. Dalam penelitian ini CNNIndonesia.com membuat suatu *framing* pada pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai pelayanan publik yang mengarah bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat dan dianggap menyulitkan masyarakat, dengan contoh judul berita “Syarat BPJS Kesehatan Dinilai Bikin Warga Malas Urus SIM dan STNK” yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2022. Sejak ditandatanganinya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Terdapat puluhan berita di portal berita online CNNIndonesia.com yang berkaitan dengan kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai pelayanan publik. Pemberitaan ini mulai masif diberitakan oleh CNNIndonesia.com pada 18 Februari 2022 bersamaan dengan ramainya perbincangan publik mengenai kebijakan tersebut. Berikut beberapa

judul pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai pelayanan publik yang diberitakan oleh CNNIndonesia.com di bulan Februari 2022

Tabel 1.1 List Berita Terkait Pemberitaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Akses Berbagai Pelayanan Publik Pada Portal Berita Online CNNIndonesia.com

No.	Tanggal Berita	Pukul	Kanal	Judul Pemberitaan
1	19 Februari 2022	21:15 WIB	Nasional	DPR Minta Batalkan Aturan Jual Beli Tanah Wajib Punya Kartu BPJS
2	19 Februari 2022	13:50 WIB	Ekonomi	Warga Wajib Punya Kartu BPJS Kesehatan Urus SIM, STNK hingga Naik Haji
3	20 Februari 2022	13:14 WIB	Nasional	Warga Keberatan BPJS Jadi Syarat Umroh: Semakin Ribet Birokrasi
4	20 Februari 2022	10:51 WIB	Nasional	Warga soal Kartu BPJS Kesehatan buat Jual Beli Tanah: Tak Ada Kolerasi
5	21 Februari 2022	15:33 WIB	Nasional	PKS Kritik BPJS Jadi Syarat Jual-Beli Tanah: Pemerintah Putus Asa
6	21 Februari 2022	10:40 WIB	Nasional	DPR: Instruksi Jokowi Kartu BPJS Jadi Syarat Beli Tanah Absurd
7	21 Februari 2022	08:47 WIB	Teknologi	Instruksi Jokowi Soal BPJS Kesehatan Trending Topic, Netizen Bingung
8	23 Februari 2022	18:24 WIB	Nasional	Moeldoko: Masyarakat Mampu Beli Tanah, Tak Masalah Bayar Iuran BPJS

9	23 Februari 2022	16:00 WIB	Teknologi	ITW soal Bikin SIM dan STNK Harus Punya BPJS: Sarat Pemaksaan
10	25 Februari 2022	05:46 WIB	Teknologi	Syarat BPJS Kesehatan Dinilai Bikin Warga Malas Urus SIM dan STNK

Sumber : data diolah penulis 2022

Oleh karena itu, Penulis akan menganalisis hasil pemberitaan mengenai BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik yang media CNNIndonesia.com beritakan dengan memakai analisis *framing* Robert N. Entman. Pada *framing* Robert N. Entman ini, pembingkai melihat dari pendefinisian suatu masalah, memprediksi sumber masalah, selanjutnya melahirkan pertimbangan moral, serta mengedepankan penyelesaian pada sebuah wacana dalam menitikberatkan isi pikiran dari sebuah peristiwa yang hendak diangkat.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini peneliti tertarik akan mencoba meneliti secara mendalam bagaimana portal berita online dalam membingkai suatu isu dalam berita dengan judul **“ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT AKSES BERBAGAI LAYANAN PUBLIK PADA PORTAL BERITA ONLINE CNNINDONESIA.COM BULAN FEBRUARI 2022”**. selanjutnya dalam memudahkan penulis untuk menemukan berita yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji dalam hal ini BPJS Kesehatan, oleh karena itu kata kunci yang penulis gunakan adalah “BPJS Kesehatan syarat” di situs media online CNNIndonesia.com

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis menarik sebuah rumusan masalah, bagaimana media online CNNIndonesia.com dalam membingkai pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana media online CNNIndonesia.com dalam membingkai pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pihak praktisi komunikasi, terlebih lagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi untuk dapat memahami bagaimana media online CNNIndonesia.com dalam membingkai pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi suatu gambaran mengenai pembingkaiian pihak media, yang kemudian berguna sebagai bahan pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan untuk wartawan dan media massa online, terlebih lagi untuk CNNIndonesia.com dalam mendefinisikan sebuah kejadian ke dalam sebuah berita yang disampaikan ke masyarakat.
2. Untuk semua lapisan masyarakat dan pembaca untuk cermat dan bijak dalam menanggapi pemberitaan yang diberikan oleh media sehingga kedepannya masyarakat dapat melek dan kritis dalam menanggapi setiap pemberitaan oleh media dan serta menjadi tambahan referensi ketika hendak mengkaji penelitian komunikasi yang berkaitan dengan data analisis permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- APBN, D. P. (2013). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Biagi, S. (2010). *Media/Impact : Pengantar Media Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bungin, B. (2013). *Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, H. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, O. U. (2002). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2007). *How To Design and Evaluate Research in Education*. Singapore: The McGraw-Hill Companies.
- Heryanto, G. (2018). *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hikmat, P. K. (2008). *The New Glorier Webster International Dictionary*. Yogyakarta: Pandu Belajar.
- Imawan, T. (2000). *Media Surabaya Mengaburkan Makna*. Jakarta: Pantau.
- Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). *Naturalistic Inquiri*. California: Sage Publications, Inc.
- M. Romli, A. S. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*. (A. D. Ram, Trans.) Jakarta: Erlangga.

- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mondry. (2008). *Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, B., Eriyanto, & Surdiasis. (1999). *Politik Media Mengenai Berita*. Jakarta: ISAI.
- Pavlik, J. V. (2001). *Journalism and New Media*. New York: Columbia University Press.
- Santana, S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudiby, A. (1999). *Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru*. Yogyakarta: Bigraf.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Vivian, J. (2008). *Teori Komunikasi Edisi Kedelapan*. Jakarta: Prenanda Media Grup.
- Zaenuddin, H. (2007). *The Journalist* (1 ed.). Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal:

- Kartikasari, S. (2020). *Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough Terhadap Pemberitaan Jokowi Naikkan Iuran BPJS Di Tengah Pandemi*. An-Nida Vol. 12 No.2
- Launa. (2020). *Analisis Framing Berita Model Robert Entman Terkait Citra Prabowo Subianto Di Republika.Co.id*. Media dan Komunikasi Vol. 3 No. 1
- Maulsby dalam Restendy. (2016). *Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita dan Perbedaan Peran Dalam News Casting*. al-Hikmah Vol. 4 No. 2
- Naqqiyah, M. S. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNNIndonesia.com. Dan Tirto.Id Mengenai Kasus Pandemi Covid-19*. Kopis Vol. 3 No. 01

- Naomi Victoria Eryanto, Fanny Lesmana, Chory Angela Wijayanti. 2019. *Wacana Pemberitaan Separatisme Papua dalam Harian Jawa Pos*. Jurnal E-Komunikasi Vol.7 No.2. Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Raden Wahyu Utomo Martianto dan Muhamad Isnaini. 2021. *Kontra Propaganda Deklarasi Negara Papua Barat dalam Konstruksi Pemberitaan Tempo.co*. Jurnal Kajian Jurnalisme Vol.05 No.01. Universitas Budi Luhur
- Sefriani. (2003). *Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka*. UNISIA, Vol 26, No. 47, 41.
- Seftiana Noorfi Widyaningsih dan Rani Dwi Lestari. 2020. *Pembingkaiian Berita Media Daring tentang Kerusuhan di Papua (Studi pada detik.com dan reuters.com pada Tahun 2019)*. Jurnal Pekommas Vol. 5 No.1. Universitas Mercu Buana.
- Bleyer dalam Restendy. (2016). Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita dan Perbedaan Peran Dalam News Casting. *al-Hikmah Vol. 4 No. 2, 3*.
- Efa Rubawati. 2018. *Papua Dalam Media: Analisis Framing Pemberitaan Otonomi Khusus Di Papua Barat*. Jurnal Masyarakat & Budaya Vol. 20 No. 3. Universitas Airlangga.

Skripsi:

- Luvyani, A. P. (2017). *Strategi Komunikasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Surakarta) Universitas Sebelas Maret*
- Pratama, R. A. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Ekonomi Masyarakat Kelas Bawah Terkait COVID-19 di Media Online Kompas.com dan Detik.com*. Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Website:

- CNN Indonesia. (2022). BPN: BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220218163213-92-761076/bpn-bpjs-jadi-syarat-jual-beli-tanah>. Diakses pada 9 Maret 2022

- CNN Indonesia. (2022) *DPR Minta Batalkan Aturan Jual Beli Tanah Wajib Punya Kartu BPJS*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220219202720-32-761400/dpr-minta-batalkan-aturan-jual-beli-tanah-wajib-punya-kartu-bpjs>. Diakses pada 1 Maret 2022
- CNN Indonesia. (2022). *Warga Wajib Punya Kartu BPJS Kesehatan Urus SIM, STNK hingga Naik Haji*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220219134424-92-761312/warga-wajib-punya-kartu-bpjs-kesehatan-urus-sim-stnk-hingga-naik-haji>. Diakses pada 3 Maret 2022
- CNN Indonesia. (2022). *Warga Soal Kartu BPJS Kesehatan buat Jual Beli Tanah: Tak Ada Kolerasi*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220219205205-20-761404/warga-soal-kartu-bpjs-kesehatan-buat-jual-beli-tanah-tak-ada-kolerasi>. Diakses pada 1 Maret 2022
- CNN Indonesia. (2022). *Alasan Kartu BPJS Kesehatan jadi Syarat Jual Beli Tanah Hingga SIM*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220221101128-78-761768/alasan-kartu-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-hingga-sim>. Diakses pada 2 Maret 2022
- CNN Indonesia. (2022). *DPR: Instruksi Jokowi Kartu BPJS Jadi Syarat Beli Tanah Absurd*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220221093737-32-761748/dpr-instruksi-jokowi-kartu-bpjs-jadi-syarat-beli-tanah-absurd>. Diakses pada 2 Maret 2022
- CNN Indonesia. (2022). *PKS Kritik BPJS Jadi Syarat Jual-Beli Tanah: Pemerintah Putus Asa*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220221133027-32-761912/pks-kritik-bpjs-jadi-syarat-jual-beli-tanah-pemerintah-putus-asa>. Diakses pada 2 Maret 2022
- CNN Indonesia. (2022). *Warga Respons BPJS Kesehatan Jadi Syarat SIM: Malah Menghambat*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220219195218-20->

761395/warga-respons-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-sim-malah-menghambat.

Diakses pada 1 Maret 2022

CNN Indonesia. (2022). *Moeldoko: Masyarakat Mampu Beli Tanah, Tak Masalah Bayar Iuran BPJS*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220223181213-20-763126/moeldoko-masyarakat-mampu-beli-tanah-tak-masalah-bayar-iuran-bpjs>.

Diakses pada 2 Maret 2022

CNN Indonesia. (2022). *Syarat BPJS Kesehatan Dinilai Bikin Warga Malas Urus SIM dan STNK*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220224150328-384-763562/syarat-bpjs-kesehatan-dinilai-bikin-warga-malas-urus-sim-dan-stnk>.

Diakses pada 3 Maret 2022

CNN Indonesia. (2022). *Muhadjir Soal BPJS Syarat Urus Dokumen: Bukan untuk Beratkan Rakyat*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220224184543-20-763731/muhadjir-soal-bpjs-syarat-urus-dokumen-bukan-untuk-beratkan-rakyat>.

Diakses pada 12 Maret 2022

CNN Indonesia. (2022). *Dampak Syarat Baru BPJS untuk Perpanjangan STNK Jika Tak Selaras*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220225194036-384-764286/dampak-syarat-baru-bpjs-untuk-perpanjangan-stnk-jika-tak-selaras>.

Diakses pada 1 Maret 2022

PikiranRakyat.com (2022). *Bukan Hanya Pembuatan SIM dan STNK, Berikut Isi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang Mensyaratkan BPJS Kesehatan* <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013784359/bukan-hanya-pembuatan-sim-dan-stnk-berikut-isi-inpres-nomor-1-tahun-2022-yang-mensyaratkan-bpjs-kesehatan?page=2> Diakses pada 27 Februari 2022

TEMPO.CO. (2022). *2022, Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Ditargetkan Naik Jadi 244,9 Juta Jiwa*. <https://bisnis.tempo.co/read/1557017/2022-jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-ditargetkan-naik-jadi-2449-juta-jiwa/full&view=ok>. Diakses pada 28 Februari 2022